

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami nilai perusahaan. Menurut Warapsari dan Suaryana (2016) teori ini muncul ketika ada hubungan kontrak kerja sama antara manajer dan pemegang saham, hubungan kontrak kerja sama tersebut berupa pemberian wewenang oleh pemegang saham kepada manajer untuk bekerja demi pencapaian tujuan pemegang saham. Perspektif teori agensi dapat digunakan dalam memahami prinsip dari tata kelola perusahaan atau GCG yang juga meliputi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit, teori agensi memberikan pandangan bahwa praktek kecurangan yang dilakukan oleh agen hingga berdampak pada turunnya nilai perusahaan dapat diminimalisir dengan adanya suatu mekanisme pengawasan atau monitoring, yaitu melalui implementasi tata kelola perusahaan (Amrizal dan Rohmah, 2017).

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai *“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”*. Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agent*),

untuk melakukan suatu jasa atas nama *prinsipal* serta memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal, jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *agen* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal (Octavia, 2017).

2. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Isyarat atau sinyal menurut Bringham dan Houston (2006) adalah “suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan.” Teori ini mengungkapkan bahwa investor dapat melihat bagaimana keadaan suatu perusahaan dan dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah. Perusahaan yang *profitable* memberikan signal tentang perusahaannya yang relatif tidak mudah mengalami kebangkrutan dan bentuk lain dari *financial distress*, di banding perusahaan yang kurang *profitable*. Perusahaan yang menunjukkan prospek yang lebih baik di masa depan ini akan ditunjukkan dengan peningkatan harga saham. Hal ini dikarenakan adanya *asymmetric information* atau ketidaksamaan informasi antara antara *well-informed manager* dan *poor-informed stockholder*.

Menurut Bringham dan Houston (2006) *asymmetric information* adalah “situasi dimana manajer memiliki informasi yang berbeda mengenai prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor.” Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga saham ketika manajemen mengumumkan sesuatu (seperti peningkatan pembayaran dividen). Dengan demikian, pihak manajemen berpikir bahwa harga

saham saat ini sedang overvalue (terlalu mahal). Apabila hal tersebut yang dipikirkan terjadi, maka manajemen tentu akan berpikir lebih baik menawarkan saham baru, sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih mahal dari yang seharusnya. Di sisi lain, apabila perusahaan menawarkan saham baru, pemodal akan menafsirkan bahwa salah satu kemungkinannya adalah harga saham saat ini sedang terlalu mahal (sesuai dengan persepsi pihak manajemen). Sebagai akibatnya para pemodal akan menawar harga saham baru tersebut dengan harga yang lebih rendah. Karena itu emisi saham baru akan menurunkan harga saham.

3. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering kali dikaitkan dengan harga saham perusahaan (Harningsih, dkk. 2019). Nilai perusahaan terdiri dari nilai utang dan nilai saham. Untuk memudahkan analisis, tujuan tersebut sering disingkat sebagai memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Dengan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, nilai utang konstan, maka nilai perusahaan akan maksimum. Tujuan tersebut dikatakan sebagai tujuan normatif manajemen keuangan, karena mengarahkan tindakan manajer keuangan. Kemakmuran pemegang saham bisa dilihat melalui harga jual perusahaan (jika dijual) atau melalui jasa penilai perusahaan (Hanafi, 2014). Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan yaitu PER (*Price Earning Ratio*), *Tobin's Q* dan PBV (*Price Book Value*).

Dalam penelitian ini, penulis mengukur nilai perusahaan dengan metode *Tobin's Q* yang dikembangkan oleh James Tobin. *Tobin's Q* adalah indikator

untuk mengukur nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010).

Nilai *Tobins'Q* dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham (*market value of all outstanding stock*) dan nilai pasar hutang (*market value of all debt*) dibandingkan dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan dalam aktiva produksi (*replacement value of all production capacity*), maka *Tobins'Q* dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar suatu perusahaan (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). Rasio *Tobin's Q* memasukan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan, namun seluruh aset perusahaan. Dengan memasukan seluruh aset perusahaan, berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja, yaitu investor dalam bentuk saham namun juga kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2012). Jadi semakin besar nilai *Tobin's Q* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik.

$$Tobin's Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$$

Keterangan:

Tobin's Q = Nilai perusahaan

EMV = Equity Market Value (nilai pasar ekuitas)

EBV = Equity Book Value (nilai buku dari total ekuitas)

D = Nilai buku dari total hutang

4. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Berbagai literatur menyatakan berbagai pengertian mengenai tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (Haris, 2005). Menurut Syafitri dkk (2018) *good corporate governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, shareholder pada khususnya dan stakeholder pada umumnya.

Lima asas GCG yang tercantum dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, yaitu (Mutmainah, 2015) :

a. *Transparansi (Transparency)*.

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independensi (Independency)*.

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Mekanisme *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Ada empat mekanisme *good corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independent, dan komite audit (Mutmainah, 2015) :

a. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang dengan diukur dari presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Subagyo, dkk. 2018:46). Kepemilikan manajerial sering

dikaitkan sebagai upaya dalam peningkatan nilai perusahaan karena manajer selain sebagai manajemen sekaligus sebagai pemilik perusahaan akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambilnya sehingga manajerial tidak akan melakukan tindakan yang hanya menguntungkan manajer. (Syafuruddin, 2006) menyatakan bahwa harapan dari fungsi manajer puncak yang juga sebagai pemilik atau yang disebut dengan kepemilikan manajerial adalah agar manajer puncak dalam menjalankan aktivitasnya dapat lebih konsisten dengan kepentingan pemegang saham sehingga nilai perusahaan meningkat.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki manajer}}{\sum \text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun (Subagyo, dkk. 2018). Investor institusional dianggap mampu memberikan dan menggunakan informasi laba dalam periode sekarang untuk memprediksi laba yang akan terjadi di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor non institusional.

Kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan memanfaatkan informasi, dan turut serta dalam mengatasi konflik keagenan karena dengan meningkatnya kepemilikan institusional maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi oleh pihak institusi atau lembaga. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga

agency cost yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat (Marfuah dan Kandra, 2017).

Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusi} = \frac{\sum \text{Saham Dimiliki Institusi}}{\sum \text{Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

c. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah seorang komisaris independen yang tidak memiliki saham namun ditunjuk untuk menjadi dewan komisaris independen karena kapasitas kepemilikan ilmu dan pengalaman yang lebih dalam bidang-bidang penting di perusahaan dan telah diakui (Fahmi, 2014). Disamping anggota Dewan komisaris dengan kekuasaan eksekutif, dewan komisaris harus juga terdiri dari anggota independen, yaitu komisaris independen atau non eksekutif (Johari, 2008). Proporsi komisaris independen adalah persentase jumlah komisaris independen dibagi total jumlah anggota dewan komisaris. Sesuai Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-399/BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan bahwa untuk mencapai *good corporate governance*, jumlah komisaris independen yang harus terdapat dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Dewan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme dari *good corporate governance* yang baik dimana anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi diperusahaan, maka dengan adanya dewan komisaris independen didalam perusahaan maka akan adanya pengawasan secara objektif

dan pada akhirnya dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Padmayanti, dkk. 2019). Dan pada akhirnya perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat menarik para investor untuk berinvestasi serta akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan.

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

d. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat (Samsul, 2006). Menurut Mutmainah (2015) komite audit adalah suatu komite yang berkerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi oleh institusi (institusi yang dimaksudkan adalah pemerintah, perusahaan asing dan lembaga keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

5. Kualitas Laba

Salah satu informasi yang ada dalam laporan keuangan adalah informasi laba perusahaan. *Statement Of Financial Accounting (SFAC)* menyatakan bahwa informasi laba merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif (Saputra, 2013:24). Menurut PSAK no. 1, informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dapat dikendalikan di masa akan datang, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (Ikatan Akuntan Indonesia, diakses pada 20 Juni 2020 pukul 21.40).

Menurut Soemarso, laba adalah selisih lebih pendapatan dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut (Gade, 2005: 15). Laba digunakan sebagai alat ukur kinerja dari manajemen perusahaan dalam periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggung jawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya, serta digunakan untuk memprediksi prospek perusahaan tersebut dimasa yang akan datang.

Menurut Purnamasari, dkk (2016) kualitas laba merupakan perbedaan antara laba bersih yang dilaporkan dalam laba rugi dengan laba yang sesungguhnya, sehingga dapat mencerminkan kinerja perusahaan secara nyata. Menurut Kim *et. al.* kualitas laba dapat dianggap sebagai ukuran lebih luas untuk kualitas pelaporan dalam lingkup keuangan. Kualitas laba sangat penting bagi

pengguna informasi keuangan juga bagi para praktisi, regulator dan peneliti akuntansi. Laba yang di laporkan dipandang sebagai informasi yang utama dalam penyajian laporan keuangan. Informasi akuntansi dianggap berharga dan reliabel jika disajikan tanpa bias (Indriani, 2019: 5). Dengan kata lain, laba yang dilaporkan memiliki kekuatan respon (*power of response*) yang besar.

Kualitas laba merupakan ukuran untuk mencocokkan apakah laba yang dihasilkan sebanding dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kualitas laba yang tinggi, jika mendekati perencanaan awal atau bahkan melebihi target dari rencana awal, maka dapat dikatakan kinerja perusahaan tersebut baik. Namun, jika kualitas laba rendah dan tidak sesuai dengan laba yang sebenarnya sehingga informasi yang didapat dalam laporan laba akan menjadi bias dan dampaknya akan menyesatkan kreditor dan investor dalam mengambil keputusan (Paulus, 2012: 23).

Menurut Wariato (2014: 20) laba yang berkualitas merupakan laba yang memiliki 3 karakteristik, yaitu:

- a. Laba yang berkualitas mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat.
- b. Laba yang berkualitas mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa depan.
- c. Laba yang berkualitas dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan.

Menurut Schipper dan Vincent (2003) (dalam Paulus, 2012: 25) mengelompokkan konstruk kualitas laba dan pengukurannya dalam ditentukan berdasarkan beberapa cara, yaitu:

- a. Kualitas laba didasarkan pada sifat runtut waktu laba, meliputi persistensi, prediktabilitas (kemampuan prediksi) dan variabilitas.
- b. Kualitas laba didasarkan pada hubungan laba kas akrual yang dapat diukur dengan berbagai ukuran, meliputi rasio kas operasi dengan laba, perubahan akrual total, estimasi abnormal, dan estimasi hubungan akrual kas.
- c. Kualitas laba didasarkan pada konsep kualitatif kerangka konseptual.
- d. Kualitas laba didasarkan pada keputusan implementasi yang meliputi kualitas laba yang berhubungan negatif dengan banyaknya pertimbangan, estimasi dan prediksi yang diperlukan oleh penyusun laporan keuangan. Dan kualitas laba yang berhubungan negatif dengan besarnya keuntungan yang diambil oleh manajemen dalam menggunakan pertimbangan agar menyimpang dari tujuan standar (manajemen laba).

Rasio kualitas laba menunjukkan varians antara arus kas dengan laba bersih, jika semakin tinggi rasio maka semakin tinggi kualitas laba karena semakin besar laba operasi yang direalisasikan dalam bentuk kas. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan > 1 maka kualitas laba semakin baik, namun sebaliknya jika rasio yang dihasilkan < 1 maka kualitas laba akan semakin buruk karena antara arus kas operasi dengan laba memiliki korelasi dimana setiap rupiah yang dihasilkan oleh laba harus mencerminkan setiap rupiah yang ada pada arus kas.

Adapun rumus yang dapat digunakan dalam penentuan kualitas laba adalah sebagai berikut (Stice *et. al* dalam Sari, 2018: 14):

$$Kualitas\ Laba = \frac{Arus\ kas\ operasi}{Laba\ bersih}$$

B. Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS DAN TAHUN	VARIABEL DEPENDEN	VARIABEL INDEPENDEN	HASIL
1.	Oktari, Mela dan Zarefar (2018)	Variabel dependen: nilai perusahaan,	variabel independen: GCG	Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan
2.	Any Novianti (2018)	Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative

3.	Dewi Widya Ningsih (2018)	Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
	Jonathan dan Machdar (2018)	Kualitas laba dan nilai perusahaan		Kualitas laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan
4.	Tria Safitri, Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily (2017)	Variabel Dependen: Nilai Perusahaan.	Variabel Independen: Komite Audit.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

				an
5.	Utomo dan dianawati (2017)	Variabel dependen : nilai perusahaan	Variabel independen : kualitas laba, gcg	GCG tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan
6.	Sally Malva Octavia (2017)	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan.	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan
7.	Pramurza dan Junaidi (2017)	Variable dependen : nilai perusahaan	Variabel independen : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, komite audit,	Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Komposisi dewan

			jumlah dewan direksi, kualitas audit.	Komisaris independen dan Komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan Jumlah dewan direksi dan Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
8.	Kadek Ria Citra Dewi dan I Gede Sanica (2017)	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan.	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

9.	Michelle Freshillia Welim dan Rusti (2017)	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan.	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan
10.	Amrizal dan Steffi Hajar Nur Rohmah (2017)	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan.	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif, sedangkan variabel dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

11.	Mei Cyntia T, Muhammad Saifi dan Raden Hidayat (2017)	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan.	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
12.	Dewi dan Devi (2017)	Variabel dependen : nilai perusahaan	Variabel independen : kualitas laba	Kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
13.	Sugianto dan Sjarief (2016)	Variabel dependen : nilai perusahaan	Variabel independen : Komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kualitas laba.	Kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
14.	Syapruddin dan Prasetyaningrum (2015)	Variabel dependen : nilai perusahaan	Variabel independen: Keputusan	PER berpengaruh

			Investasi (PER), Kualitas Laba (NPM).	positif terhadap PBV, NPM berpengaruh positif terhadap PBV
15.	Mutmainah (2015)	Variabel dependen : nilai perusahaan	Variabel independen : <i>Good corporate governance, corporate social responsibility.</i>	GCG berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
16.	Rustan, Said dan Rura (2014)	Variabel dependen : nilai perusahaan	Variabel independen : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba.	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kualitas laba

				tidak berpenga ruh terhadap nilai perusaha an
--	--	--	--	---

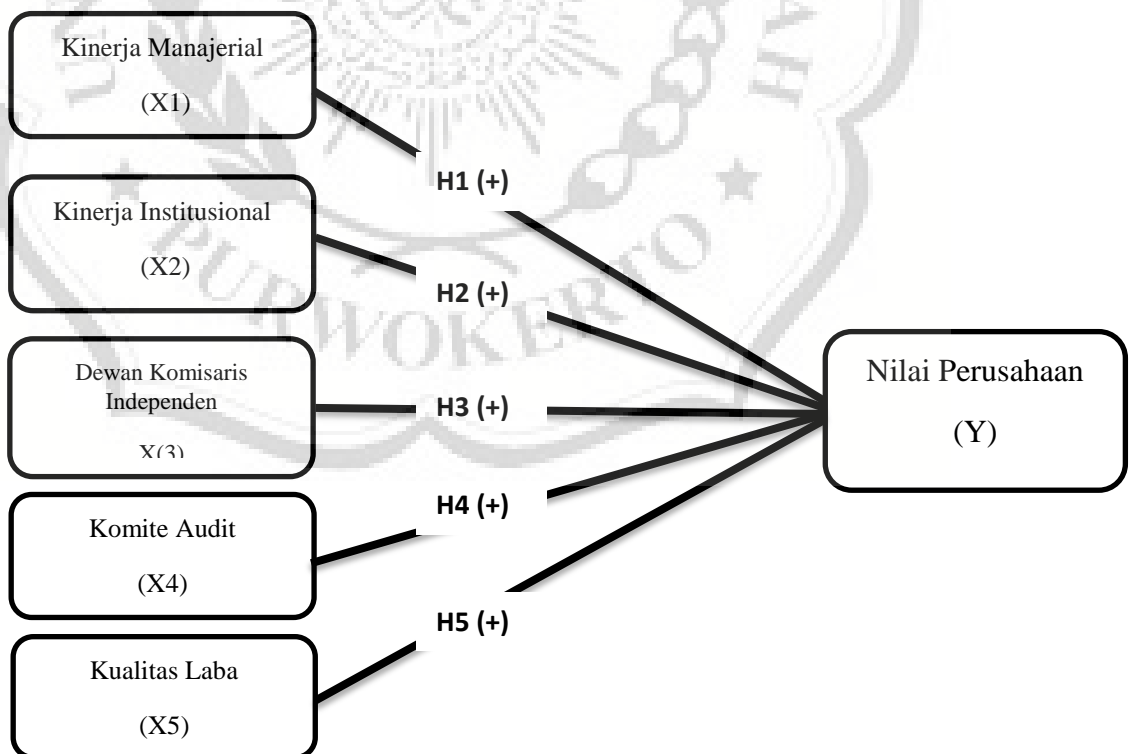
Sumber : diolah dari berbagai hasil penelitian , 2020



C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Pramurza dan Junaidi, 2017), kepemilikan insititusal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Damayanti dan Suartana,2014), dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Chunyan Liu, Konari Uchida, dan Yufeng Yang, 2012), dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Ardiansyah (2014), kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan Dewi dan Devi (2017).

Gambar 2.1
Model Penelitian



D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data, sugiyono (2012).

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Dalam teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Pramurza dan Junaidi, 2017) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional sendiri memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Achmad Muzaki ,2017).

Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara professional perkembangan investasinya, maka tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. (Ramadhan Sukma , 2014).

Dalam penelitian terdahulu (Damayanti dan Suartana ,2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Dari uraian diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

3. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Komisaris independen merupakan posisi terbaik dalam melaksanakan fungsi dalam tujuan untuk mencapai dan mewujudkan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Fungsi dari komisaris independen adalah untuk mengontrol atau mengawasi kinerja dari dewan direksi (Mei Cyintia, Saifi dan Raden Rustam ,2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahmud Hossain, Andrew K. Prevost, dan Ramesh P. Rao, 2001) dan (Chunyan Liu, Konari Uchida, dan Yufeng Yang , 2012), menunjukkan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen pada perusahaan, akan memberikan dampak positif dengan meningkatnya nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H3 :Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

4. Pengaruh Komposisi komite audit Terhadap Nilai Perusahaan

Komite audit merupakan sejumlah orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor mempertahankan independensinya dari manajemen (Muzaki, 2017).

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional untuk membantu dewan komisaris. Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya manipulasi dalam informasi yang disajikan sehingga dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, Amrizal (2017).

Dalam peneliti terdahulu Amrizal (2017), mengatakan bahwa adanya pengaruh positif antara komite audit dengan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

5. Pengaruh Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan

Chan dkk (2001) menguji apakah return saham yang akan datang akan merefleksikan informasi mengenai kualitas laba saat ini. Kualitas laba diukur dengan akrual. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan akrual yang tinggi menunjukkan laba perusahaan berkualitas rendah, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didukung penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006:16) bahwa kualitas laba mempengaruhi nilai perusahaan ($\alpha=5\%$). Penelitian Bernard dan Stober dalam Siallagan dan Machfoedz (2006:13) menjelaskan Earnings dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila earnings yang dilaporkan dapat digunakan oleh para pengguna (users) untuk membuat keputusan yang terbaik, dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan return saham hasil penelitian yang dilakukan Dewi dan Devi (2017) menunjukkan bahwa kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H5 : Kualitas Laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.